

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kualitas audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan variabel penelitian dan kurun waktu yang berbeda serta lokasi penelitian. Singgih (2010) dalam penelitiannya tentang pengaruh independen, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Peneliti ini menemukan bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi, *due professional care* dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan.

Pancawati (2009) meneliti tentang pengaruh *due professional care*, etika dan tenur terhadap kualitas audit. Peneliti ini mengemukakan bahwa etika dan tenur berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan *due professional care* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Rohman (2012) dalam penelitiannya menyelidiki tentang analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas audit aparat inspektorat kota/ kabupaten di Jawa Tengah. Menyatakan bahwa obyektifitas dan integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan independensi, pengetahuan, pengalaman, etika dan skeptisisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Ardini (2010) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi terhadap kualitas audit. Menyatakan bahwa

kompetensi, independensi, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Tabel 2.1.
Ringkasan
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti (tahun)	Variable	Hasil penelitian
1.	Pengaruh independensi, pengalaman, due profesional care dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Singgih dan icuk (2010)	<input type="checkbox"/> Dependen : - kualitas audit <input type="checkbox"/> Independen : - independensi - pengalaman - due profesional care - akuntabilitas	<input type="checkbox"/> Berpengaruh signifikan : - pengalaman <input type="checkbox"/> Tidak berpengaruh signifikan : - independensi - due professional care - akuntabilitas
2.	Pengaruh due professional care, etika, dan tuner terhadap kualitas audit Martining, Pancawati (2009)	<input type="checkbox"/> Dependen : - kualitas audit <input type="checkbox"/> Independen : - due professional care - etika - tuner	<input type="checkbox"/> Berpengaruh signifikan : - etika - tuner <input type="checkbox"/> Tidak berpengaruh signifikan : - due professional care
3.	Pengaruh pengalaman kerja, independensi, kompetensi, dan integritas terhadap kualitas audit. Kamaliah Elfi Ilham (2011)	<input type="checkbox"/> Dependen : - kualitas audit <input type="checkbox"/> Independen : - pengalaman kerja - independensi - kompetensi - integritas	<input type="checkbox"/> Berpengaruh signifikan : - pengalaman kerja - independensi - kompetensi - integritas

4.	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas audit aparat inspektorat kota/ kabupaten di Jawa Tengah. Rohman, Abdul dan Queena (2012)	<input type="checkbox"/> Dependen : - kualitas audit <input type="checkbox"/> Independen : - independensi - obyektifitas - pengetahuan - pengalaman - integritas - etika - skeptisisme	<input type="checkbox"/> Berpengaruh signifikan: - obyektifitas - integritas <input type="checkbox"/> Tidak berpengaruh signifikan : - independensi - pengetahuan - pengalaman - etika - skeptisisme
5.	Pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi terhadap kualitas audit. Ardini, Lilis (2010)	<input type="checkbox"/> Dependen : - kualitas audit <input type="checkbox"/> Independen : - kompetensi - independensi - akuntabilitas - motivasi	<input type="checkbox"/> Berpengaruh signifikan: - independensi - akuntabilitas - motivasi <input type="checkbox"/> Tidak berpengaruh signifikan : - akuntabilitas

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Stewardship Theory*

Teori ini menyatakan bahwa para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan- tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (precilia, 2012).

Stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan *shareholder* pada khususnya. Implementasinya pada penelitian ini

yaitu BPK sebagai *steward* (pengurus) dipandang sebagai pihak yang dapat bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya *stakeholder* dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga *good governance* dapat tercapai. Selain itu teori ini dapat menjelaskan peran auditor internal tidak hanya sekedar untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan bukti pendukung, tetapi juga sebagai pemberi saran kepada *auditee* (pihak yang diaudit) sebagai *shareholder*. Saran inilah yang nantinya dijadikan pertimbangan bagi manajemen dalam efektivitas pengelolaan keuangan.

2.2.2. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab perilaku seseorang. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang ditentukan dari internal ataupun eksternal yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Harini, 2010). Penyebab perilaku dalam persepsi sosial dikenal dengan *dispositional attributions* dan *situasional attributions*. *Dispositional attributions* mengacu pada sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan *situasional attributions* mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku.

Harrold Kelley dalam Lilis (2010) teorinya menjelaskan bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab serta dasar seseorang melakukan suatu perbuatan. Menurut Kelley terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan orang untuk menarik kesimpulan apakah suatu perbuatan atau

tindakan itu disebabkan oleh sifat dari dalam diri (disposisi) ataukah disebabkan oleh faktor luar. Ketiga faktor pertimbangan tersebut adalah:

1. *Distinctiveness*, konsep ini merujuk pada bagaimana seseorang berperilaku dalam kondisi yang berbeda-beda.
2. *Consistency*, suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang konsisten dari satu situasi ke situasi yang lain.
3. *Consensus*, situasi yang membedakan perilaku seseorang dengan perilaku orang lain dalam menghadapi situasi yang sama.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam menentukan kualitas audit yang dilakukannya, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Karakteristik personal seorang auditor merupakan faktor penentu utama dalam menentukan kualitas audit, karena hal tersebut merupakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.2.3. Kualitas Audit

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu, kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Ketika auditor ditugaskan untuk melakukan audit, maka kualitas dari tugas yang ia jalankan lebih berhubungan dengan kualitas diri sebagai orang pribadi dibandingkan dengan kualitas Kantor Akuntan dimana ia bernaung. Auditor memang mendasarkan pekerjaannya pada prosedur audit yang dimiliki oleh Kantor Akuntan tersebut.

Namun sesuai dengan Watkin dan Hillisons dalam Kushariyanti (2003), penggunaan prosedur atau teknologi audit dengan benar adalah lebih dari pada kepemilikan prosedur audit. Kantor Akuntan hanyalah sebagai penyedia sumberdaya dan dalam hal tertentu tidak memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa prosedur audit telah dijalankan. Sampai saat ini belum ada definisi yang tepat mengenai apa dan bagaimana kualitas audit yang baik itu. Memang tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya.

De Angelo dalam Nizaratul (2007) Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menentukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang Akuntan Publik dalam menjalankan tugas auditnya harus berpegang pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku, harapannya audit dapat mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dan para pemegang saham. Dengan dipatuhinya prinsip dan standar yang berlaku dalam pemeriksaan tujuan yang ingin dicapai adalah hasil audit yang dihasilkan diharapkan dapat dikatakan berkualitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil.

Ada empat hal dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu (1) lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada

klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar dan (4) *review* oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa: “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat

membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

Dari pengertian diatas, agar laporan audit yang dihasilkan auditor berkualitas, maka auditor harus menjalankan pekerjaannya secara professional. Auditor harus bersikap independen terhadap klien, mematuhi standar auditing dalam melakukan audit atas laporan keuangan, memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan melakukan tahaptahap proses audit secara lengkap (Sari, 2011).

2.2.4. Independensi

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Dalam Arens (2004) menyatakan nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. Sikap independen meliputi independen dalam fakta (*in fact*) dan independen dalam penampilan (*in appearance*).

Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, dalam Purba 2009).

Dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, akuntan publik memperoleh kepercayaan diri dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri (Indah, 2010).

Dalam Standar *Professional* Akuntan Publik (SPAP) seksi 220, Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Auditor secara intelektual harus jujur, bebas dari kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien, baik terhadap manajemen maupun pemilik.

2.2.5. Obyektifitas

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) Dapat diandalkan dan dipercaya, (2) Tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) Dapat mempertahankan kriteria dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis (Sukriah, 2009).

2.2.6. Pengetahuan

SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit, ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu: (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah (Harhinto 2004).

2.2.7. Pengalaman Kerja

Marinus dan Herliansyah dalam Sukriah (2009) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (*job*). Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: (1) mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan dan (3) mencari penyebab munculnya kesalahan.

Knoers dan Haditono dalam Bawono (2010) mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non

formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Variabel pengalaman akan diukur dengan menggunakan indikator lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya.

2.2.8. Integritas

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005 dalam Sukriah, 2009).

Menurut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Integritas No. 102 adalah dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (Conflict Of Interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain. Pada dasarnya integritas akuntan adalah suatu sikap akuntan yang mampukah ia bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa yang berhubungan langsung dengan kepercayaan publik.

2.2.9. Etika

Pengertian etika menurut Sari (2011), bahwa etika adalah pedoman atau aturan yang menjadi dasar seseorang untuk berperilaku dan bertingkah laku dalam masyarakat dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip moral yang lebih dipertegas, baik dalam aturan maupun sanksi yang mengikatnya serta ditujukan untuk menjamin tercapainya keadilan yaitu keseimbangan antara kewajiban yang harus dilakukan serta hak yang diinginkan dalam organisasi profesi/ masyarakat.

Suraida (2005) etika sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah lakuyang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu. Penting bagi seorang auditor untuk menjunjung tinggi langkah laku dan moral dalam menjalankan tugas yang dipikulnya. Jika auditor tidak mengakui sifat dasaretika dalam keputusan, skema moralnya tidakakan mengarah pada masalah etika tersebut (Aziza dan Salim dalam Martiningsih, 2009).

2.2.10. Skeptisisme

Skeptisisme profesional auditor merupakan suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan faisal (2010), Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2001) menyatakan skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.

2.3. Hubungan Logis antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atau simpulan, sehingga dengan demikian pendapat atau simpulan yang diberikan tersebut berdasarkan integritas dan objektivitas yang tinggi.

Hasil penelitian Trisnaningsih (2007) mengindikasikan bahwa auditor hanya memahami *good governance* tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensinya maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh Alim (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Angelo (1981) dan Sekar (2003). Selain itu, menurut Alim (2007), interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen (Sukriah dkk., 2009). Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.2. Pengaruh Obyektifitas Terhadap Kualitas Audit

Penelitian yang dilakukan Wibowo (2006) menyebutkan auditor yang memiliki obyektifitas yaitu auditor yang dapat melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya. Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi obyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan.

Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan (Sukriah dkk., 2009). Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Obyektifitas Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.3. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kualitas Audit

SPAP (2001) tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan.

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan

(pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard, 1987 dalam Harhinto, 2004:35). Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pengetahuan Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.4. Pengaruh Pengalaman Terhadap Kualitas Audit

Knoers dan Haditono (1999) dalam Asih (2006:12) mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit (Nataline, 2007).

Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.5. Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit

Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal, jujur dan terus terang dalam batasan objek pemeriksaan. Pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Penelitian yang dilakukan Mabruhi dan Winarna (2010) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik. Sunarto (2003) dalam Sukriah, dkk. (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Wibowo (2006) mengemukakan integritas auditor menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas keputusan mereka. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Integritas Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.6. Pengaruh Etika Terhadap Kualitas Audit

Etika merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku maupun perilaku seseorang. Seorang Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya dan keputusan auditnya harus mempertimbangkan kode etik etika profesinya sebagai standar pekerjaan. Etika profesi dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat karena

masyarakat akan mempercayai profesi seseorang jika telah menerapkan standar mutu yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Profesional dalam etika profesi mengisyaratkan suatu kebanggaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan klien dan keinginan tulus dalam membantu permasalahan yang dihadapi klien sehingga profesi tersebut dapat menjadi kepercayaan masyarakat (Purba, 2009). Etika profesi berkaitan erat dengan masalah prinsip yang dipegang Akuntan Publik untuk menjaga, menjunjung, serta menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti tanggung jawab profesi dan perilaku profesional. Semakin tinggi etika yang dijunjung Akuntan Publik maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula. Larkin (2000) dalam Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat mengidentifikasi perilaku etis dan tidak etis sangat berguna bagi semua profesi termasuk auditor. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Etika Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.7. Pengaruh Skeptisisme Professional Terhadap Kualitas Audit

Skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Skeptisisme profesional auditor tersirat di dalam literatur dengan adanya keharusan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang material yang terjadi di dalam perusahaan klien (Loebbecke dalam Rohman, 2012).

Ida (2005), Marghfirah dan Syahril (2008) menguji hubungan skeptisisme profesional auditor dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik dan apakah ada hubungan situasi audit, etika, pengalaman, dan keahlian audit dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara skeptisisme profesional auditor dan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H7: Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh independensi, obyektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas, etika, kompleksitas, serta skeptisisme professional auditor terhadap kualitas audit.

Diagram 2.1
Kerangka Konseptual

